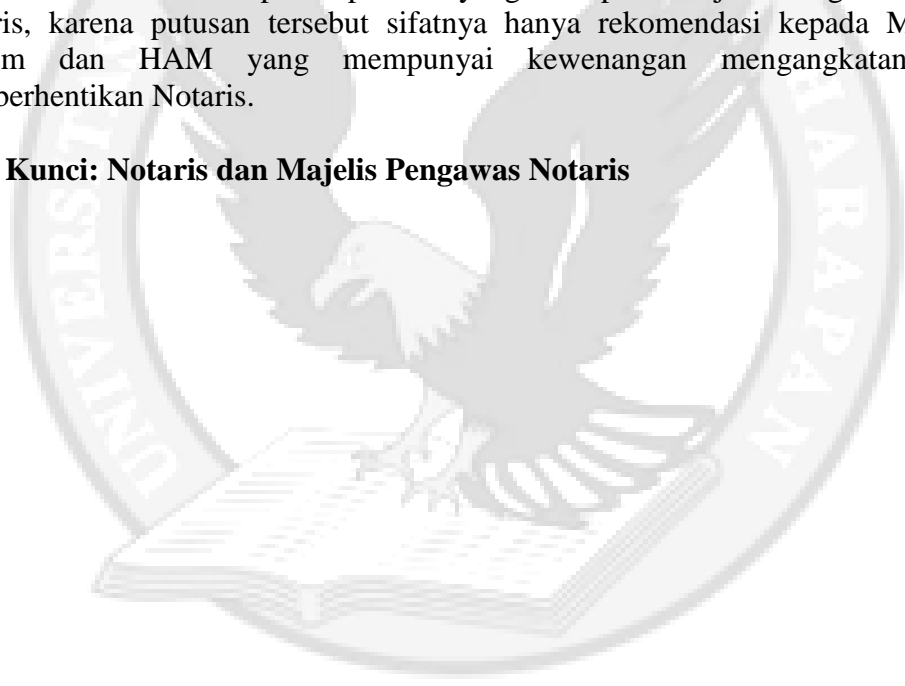


ABSTRAK

Keberadaan Majelis Pengawas Notaris sebagai suatu badan yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, dinilai belum sosialisasikan dengan baik kepada semua lapisan masyarakat dan Notaris. Serta pembagian kewenangan terhadap Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat terhadap pemeriksaan dan penjatuhan sanksi serta eksekusi terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris yang konkrit, jelas dan tegas, sehingga keberadaan Majelis Pengawas Notaris dipandang sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris terhadap kepastian akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, sebagai dasar hukum yang mengatur tata cara pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran jabatan Notaris kepada Majelis pengawas Notaris, dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah pemberhentian hanya bersifat usulan kepada Majelis Pengawas Pusat kecuali sanksi teguran yang bersifat *final and banding*. Usulan pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat bukan merupakan putusan yang final pada Majelis Pengawas Pusat Notaris, karena putusan tersebut sifatnya hanya rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Notaris.

Kata Kunci: Notaris dan Majelis Pengawas Notaris



ABSTRACT

The existence of the Notary Supervisory Board as a body authorized to provide guidance and supervision of Notaries, is considered not to have been well socialized to all levels of society and Notaries. As well as the distribution of authority to the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council and Central Supervisory Council for examination and imposition of sanctions as well as execution of concrete, clear and firm decisions of the Notary Supervisory Council, so that the existence of the Notary Supervisory Council is seen as necessary by the public as users of Notary services for certainty authentic deed made by a Notary. Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 15 of 2020 concerning Procedures for Examination by the Supervisory Board of Notaries, as a legal basis governing procedures for examining reports of public complaints regarding alleged violations of the Notary's office to the Notary Supervisory Council, and imposition of sanctions by the Regional Supervisory Council for dismissal is only a suggestion to the Central Supervisory Council except for final and appeal sanctions. Proposals for temporary dismissal and dishonorable dismissal are not final decisions at the Notary Central Supervisory Board, because these decisions are only recommendations to the Minister of Law and Human Rights who has the authority to appoint and dismiss Notaries.

Keywords: Notary and Notary Supervisory Board.

